

**PROSIDING
PENELITIAN BAGIAN
HUKUM TATA NEGARA**



**TAHUN 2016
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

PROSIDING

Editor:

M.Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriyah

Lay Out:

Rudi Wijaya, Ahmad Distady Falami, Lela Setianingsih

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jl.Prof.Sumantri Brodjonegoro Gedong Meneng Nomor 1

Fakultas Hukum Gdg B Universitas Lampung – Bandar Lampung

PROSIDING

**HASIL PENELITIAN BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

Edisi Pertama, Januari 2017

Vii+ 201 pages; 14,5 x 21 cm

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG, 2016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR KETUA BAGIAN HTN	iv
KATA PENGANTAR REDAKSI	v
DAFTAR ISI	vii
A. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam menanggulangi Kemiskinan (Studi Perancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur) (<i>Yulia Netta dan Ade Arif Firmansyah</i>).....	8
B. Evaluasi Model Pemilihan Calon Anggota Panwaslu di Provinsi Lampung (<i>Yusnani Hasyim zoem dan M.Iwan Satriawan</i>).....	84
C. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (<i>Rudy,Zulkarnaen Ridlwan dan Siti Khoiriyah</i>)	101
D. Kedudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Pasal 22A UUD 1945 (<i>Ahmad Saleh, Muhtadi dan Chandra Purbaningsih</i>)	150

PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Oleh:

Rudy, Zulkarnaen Ridlwan dan Siti Khoiriyah

Abstraksi

amandemen UUD 1945 posisi desa memiliki arti penting dalam keikutsertaannya tumbuh kembangkan pembangunan di daerah. Berdasarkan keadaan empiris Indonesia, secara historis terdapat Desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis Desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara. Oleh karena itu setelah memiliki undang-undang tersendiri yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa semakin memiliki kewenangan dan kewajiban yang kuat tidak seperti halnya desa masih menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu bentuk kewenangan yang sangat penting adalah mengenai pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini fokus pada perencanaan pengelolaan keuangan desa sebagai upaya mewujudkan transparansi anggaran di tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan fakta-fakta dilapangan. Keluaran dari penelitian ini adalah berupa sistem perencanaan pengelolaan keuangan desa yang terpadu.

Kunci: Amandemen UUD 1945, Desa, Sistem perencanaan pengelolaan keuangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, demikian sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dibagi Atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.⁶⁷ Berdasarkan keadaan empiris Indonesia, secara historis terdapat Desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis Desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara.⁶⁸ Antara Desa, kerajaan, ataupun negara sama-sama merupakan bentuk

⁶⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
⁶⁸ Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan)*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 361

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa;

Website
diman Sudjamiko, tanpa tahun, *Isu-isu Strategis UU Desa*,
www.bunghatta.ac.id/download-Isu%20Strategis%20UU%20Desa.pdf.html (online), (15 April 2015).

<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.tulangbawangbarabaru>
diunduh 18 Juni 2015

<http://www.ruajurai.com/read/2016/01/05/2016-dana-desa-di-tuba-barat-rp56-m.html>
akses tanggal 21 April 2016 pada pukul 07.30Wib

<http://e-journal.uajy.ac.id/6945/1/JURNAL.pdf>